

Optimalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Sarana Literasi Moderasi Beragama Bagi Masyarakat

I Wayan Wiryawan^{1*}, Mustofa Aji Prayitno², I Gede Bagus Wisnu Bayu Temaja³, Meriyati⁴

^{1*,3}IKIP Saraswati, Tabanan, Bali, Indonesia,

²IAIN Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia,

⁴UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 28, 2024

Accepted Sep 11, 2024

Published Online Des 28, 2024

Keywords:

Inklusi Sosial

Kerukunan Antaragama

Literasi

Moderasi Beragama

Perpustakaan Desa

ABSTRACT

Pada era modern ini, perpustakaan bukan lagi hanya tempat untuk meminjam dan membaca buku, tetapi juga merupakan pusat komunitas yang berfungsi sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, dan berinovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang sebagai sarana untuk mempromosikan literasi moderasi beragama dan memperkuat kerukunan sosial di masyarakat. Program-program ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti "Baca Sama-sama", lokakarya literasi, dan pameran buku yang menampilkan keberagaman agama dan budaya. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengelola perpustakaan, partisipan program, dan pemangku kepentingan terkait. Analisis data menunjukkan bahwa program inklusi sosial telah berhasil menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dialog antaragama dan antarbudaya, meskipun menghadapi tantangan seperti tantangan dalam mengatasi prasangka dan stereotip, ketersediaan tenaga ahli dan relawan, kesadaran penuh masyarakat, dan kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif termasuk peningkatan pemahaman antaragama, penguatan jaringan sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pendanaan untuk perpustakaan, melanjutkan edukasi dan pelatihan masyarakat tentang literasi moderasi beragama, dan memperkuat kolaborasi antar *stakeholder*. Dengan langkah-langkah ini, program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang dapat terus menjadi model berkelanjutan dalam mendukung literasi moderasi beragama dan mempromosikan inklusi sosial di masyarakat.

This is an open access under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) licence



Corresponding Author:

I Wayan Wiryawan,

IKIP Saraswati, Tabanan, Bali, Indonesia

Jl. Pahlawan No.2, Delod Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali, 82121, Indonesia.

Email: wynwiryawan31@gmail.com

Optimalisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sebagai Sarana Literasi Moderasi Beragama Bagi Masyarakat

1. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada tantangan baru, termasuk polarisasi politik, konflik antaragama, dan ekstremisme ideologis. Moderasi menjadi isu yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan kemajemukan masyarakat (Abu-Nimer & Smith, 2016). Dalam era globalisasi, banyak negara di dunia yang menjadi semakin terbuka terhadap perbedaan dan keanekaragaman budaya, ras, agama, dan etnis (Woods, 2018). Di sisi lain, masalah rasisme, diskriminasi, dan intoleransi terhadap perbedaan khususnya dalam hal berkeyakinan atau beragama masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Prayitno & Wathoni, 2022).

Pada tahun 2019, Imparsial suatu lembaga yang berfokus pada pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia, melaporkan bahwa terdapat 31 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia selama tahun tersebut, yang dilaporkan oleh media (Imparsial, 2019). Mayoritas pelanggaran tersebut berupa pelarangan kegiatan ibadah atau ritual keagamaan sebanyak 12 kasus dan pelarangan pendirian rumah ibadah sebanyak 11 kasus. Di samping itu, juga terdapat beberapa kasus intoleransi agama lainnya seperti perusakan rumah ibadah, larangan perayaan kebudayaan etnis, serta pengaturan cara berpakaian berdasarkan agama dan keyakinan tertentu oleh pemerintah.

Sumber lain salah satunya dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mencatat banyak insiden pelanggaran kebebasan beragama selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam rentang waktu 2014 hingga 2018, KontraS mendokumentasikan setidaknya 488 insiden yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beribadah dan keyakinan. Beberapa di antaranya adalah serangan terhadap Gereja St. Lidwina di Yogyakarta serta perusakan dua wihara dan lima kelenteng di Medan, Sumatera Utara (Situmorang, 2019).

Apabila pelanggaran semacam ini terus dibiarkan terjadi tanpa upaya penanganan yang memadai, maka akan berdampak negatif terhadap keberagaman dan harmoni sosial di Indonesia (Leuwol et al., 2023). Hal ini dapat memperburuk situasi dan menimbulkan ketegangan antara masyarakat yang berbeda agama atau keyakinan (Prodyanatasari et al., 2023). Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia semacam ini juga dapat menghambat perkembangan masyarakat dan negara, serta menurunkan kualitas hidup manusia yang berada dalam lingkungannya (World

[Health Organization, 2019](#)). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan tindakan preventif dan korektif agar pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dicegah dan diberantas.

Perpustakaan dianggap sebagai jantung intelektual dan sosial suatu komunitas. Perpustakaan tidak hanya memfasilitasi akses ke pengetahuan, tetapi juga mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar ([Syukri & Wahyuni, 2024](#)). Dalam konteks ini, penting bagi perpustakaan untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan literasi moderasi beragama. Literasi moderasi beragama tidak hanya penting untuk membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap agama-agama yang berbeda, tetapi juga untuk memperkuat kerukunan sosial dan mencegah konflik.

Perpustakaan Wigati Desa Glinggang merupakan contoh nyata bagaimana perpustakaan lokal dapat bertransformasi menjadi pusat literasi dan inklusi sosial yang efektif. Terletak di tengah-tengah masyarakat yang beragam etnis dan keagamaan, perpustakaan ini telah berhasil mengadopsi pendekatan inklusi sosial dalam mendukung literasi moderasi beragama. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Perpustakaan Wigati Desa Glinggang menerapkan pendekatan inklusi sosial dalam mendukung literasi moderasi beragama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari program-program inklusi sosial yang telah diimplementasikan oleh perpustakaan ini terhadap masyarakat lokal, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memperkuat toleransi beragama dan mempromosikan kerukunan sosial di Desa Glinggang dan sekitarnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang dalam mendukung literasi moderasi beragama. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan bagaimana program-program ini berdampak pada masyarakat setempat. Partisipan penelitian akan terdiri dari pengelola perpustakaan, tokoh agama, pemerintah desa, pemimpin masyarakat, dan anggota komunitas yang terlibat dalam kegiatan literasi moderasi beragama. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara akan difokuskan pada pandangan dan pengalaman partisipan terkait program inklusi sosial, sedangkan observasi akan memberikan wawasan langsung tentang interaksi sosial dalam kegiatan perpustakaan.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan antar data. Adapun untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode. Data dari wawancara pengelola perpustakaan, tokoh agama, pemerintah desa, pemimpin masyarakat, dan anggota komunitas akan dibandingkan untuk menguji konsistensinya (triangulasi sumber). Selain itu, hasil wawancara akan dikaitkan dengan temuan observasi dan analisis dokumen (triangulasi metode) untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan validitas temuan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan program-program inklusi sosial di perpustakaan serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio* yang memiliki arti sedang (tidak kelebihan atau tidak kekurangan). Dalam bahasa Inggris berasal dari kata *moderation*, dimana kata ini sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku) dan *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam KBBI ada dua pengertian mengenai kata moderasi, yaitu: 1. Pengurangan kekerasan, dan 2. Penghindaran ke-ekstreman.

Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beragama. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi keimanan atau menyimpang dari ajaran agama, tetapi lebih kepada cara berpikir dan bertindak yang bijaksana dalam menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya toleransi dan saling menghargai perbedaan agama dan pandangan yang berbeda.

Moderasi beragama merupakan jalan tengah multikultural Indonesia yang mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia dengan cara menegakkan nilai-nilai luhur, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini bertujuan agar semua umat beragama dapat saling menghormati dan memahami sesama. Moderasi beragama juga berfokus pada peningkatan rasa saling kasih sayang, kesetaraan, dan pemahaman antar umat beragama. Hal ini bertujuan untuk membangun dan memelihara harmonisasi antar umat beragama di Indonesia.

Framming moderasi beragama dalam mengelola kehidupan beragama masyarakat

Indonesia yang plural dan multikultural menjadi penting untuk dilakukan (Sutrisno, 2019). Konsep pendidikan multikultural sendiri relevan dengan semboyan bangsa Indonesia “*Unity in Diversity*”, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, bahasa dan agama, mereka tetap dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem pendidikan nasional undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis adil dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan pluralisme bangsa (Depdiknas RI, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dan pendidikan multikultural relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penguatan moderasi beragama dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks yang meliputi gejala transnasionalisme, dampak kapitalisme global, persaingan hegemoni, politik identitas berbasis agama, dan era disrupsi inovasi (Kemenag RI, 2019).

- a. Gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrem beragama: Gejala transnasionalisme menciptakan tantangan bagi moderasi beragama dengan memfasilitasi pertumbuhan kelompok-kelompok ekstremis yang tidak terbatas oleh batas-batas negara. Kelompok-kelompok ini seringkali dapat memperoleh dukungan, sumber daya, dan ideologi dari jaringan internasional, sehingga sulit bagi negara-negara individu untuk menghadapinya secara efektif.
- b. Kapitalisme global yang melemahkan nilai-nilai agama: Dalam era kapitalisme global, nilai-nilai agama seringkali tersaingi oleh kepentingan ekonomi yang dominan. Perdagangan bebas dan arus modal yang tidak terkendali dapat mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan penurunan moral dan spiritual.
- c. Persaingan hegemoni melalui komodifikasi agama: Komodifikasi agama merupakan fenomena di mana agama dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau ekonomi oleh kekuatan-kekuatan global. Persaingan hegemoni antara negara-negara dan kelompok-kelompok tertentu sering kali memanfaatkan agama sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan mereka.
- d. Politik identitas berbasis agama: Politik identitas berbasis agama dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam masyarakat, karena memperkuat perbedaan antara kelompok-kelompok beragama dan memicu polarisasi. Hal ini dapat menghambat upaya moderasi beragama dengan mengutamakan kepentingan kelompok atas kepentingan umum dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antaragama.

- e. Era disrupsi inovasi yang menyingkirkan otoritas keagamaan, menyuburkan gejala “umat digital” dan “*urban religiosity*”: Perkembangan teknologi dan inovasi telah mengubah cara individu memandang dan berinteraksi dengan agama. Fenomena seperti "umat digital" dan "*urban religiosity*" menunjukkan pergeseran perilaku keagamaan menuju penggunaan media sosial dan lingkungan perkotaan yang dinamis sebagai sumber pemenuhan spiritual, yang dapat menurunkan keterlibatan dalam praktik keagamaan tradisional dan mengubah dinamika moderasi beragama.

Terdapat 4 indikator toleransi beragama yang disusun oleh Kemenag RI. Keempat indikator ini biasanya digunakan sebagai kerangka kerja dalam mengukur dan menilai tingkat toleransi beragama di suatu masyarakat atau komunitas. Adapun keempat indikator tersebut di antaranya adalah: 1) Komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kemenag RI, 2019).

a. Komitmen Kebangsaan

Indikator ini mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam konteks keberagaman agama. Ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip Pancasila, semangat persatuan, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tingkat komitmen ini tercermin dalam sikap dan tindakan yang mendukung keberagaman agama tanpa mengesampingkan identitas nasional.

b. Toleransi

Toleransi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keberagaman agama di masyarakat. Ini mencakup sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan agama tanpa adanya bentuk diskriminasi, penindasan, atau konflik antar-agama. Tingkat toleransi tercermin dalam sikap inklusif dan rasa hormat terhadap agama dan keyakinan yang berbeda.

c. Anti-Kekerasan

Indikator ini menyoroti penolakan terhadap segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas dasar perbedaan agama. Sikap anti-kekerasan ini menegaskan bahwa toleransi bukan hanya tentang ketidakadilan verbal atau non-fisik, tetapi juga menolak segala bentuk kekerasan fisik yang berbasis agama.

d. Akomodatif terhadap Kebudayaan Lokal

Indikator ini mencerminkan kemampuan individu atau masyarakat dalam menerima dan menghormati kebudayaan lokal yang berkaitan dengan agama. Hal ini melibatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan keagamaan yang ada dalam masyarakat tanpa ada upaya untuk mendominasi atau merendahkan salah satu kebudayaan

atau agama tertentu.

Indikator-indikator tersebut membantu menggambarkan bagaimana moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat diharapkan dapat hidup bersama secara damai dan harmonis meskipun memiliki perbedaan dalam hal keyakinan agama atau kepercayaan.

Implementasi Program Inklusi Sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang

Perpustakaan Wigati Desa Glinggang telah berhasil mengimplementasikan berbagai program inklusi sosial yang bertujuan untuk mendukung literasi moderasi beragama di tengah masyarakat yang beragam etnis dan keagamaan. Program-program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti "Baca Sama-sama", lokakarya literasi, dan pameran buku yang menampilkan keberagaman agama dan budaya. Wawancara dengan pengelola perpustakaan menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi anggota masyarakat dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam aktivitas literasi.

Program "Baca Sama-sama", sebagai contoh. Program ini telah menjadi platform penting untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam membaca dan mendiskusikan buku-buku yang mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Diskusi-diskusi yang terjadi selama kegiatan ini membantu memperdalam pemahaman tentang agama-agama yang berbeda dan mendorong toleransi di antara peserta.

Observasi partisipatif selama kegiatan-kegiatan ini juga mengungkapkan bahwa program-program inklusi sosial di perpustakaan tidak hanya memfasilitasi akses ke pengetahuan. Program-program tersebut juga membangun jembatan antar komunitas yang berbeda. Misalnya, kegiatan pameran buku tentang agama-agama dunia tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman agama, tetapi juga memperkuat identitas lokal masyarakat Desa Glinggang.

Selain itu, partisipasi aktif dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam program-program ini telah memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi upaya-upaya inklusi sosial. Mereka berperan sebagai mediator dan penggerak dalam membangun dialog antaragama yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perpustakaan, tokoh agama, dan masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat harmoni sosial di tingkat lokal.

Adapun strategi implementasi program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang dapat dipaparkan pada poin-poin sebagai berikut:

a. Program "Baca Sama-sama" dan kegiatan literasi

Program "Baca Sama-sama" di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang telah menjadi

inti dari upaya untuk mempromosikan literasi moderasi beragama. Program ini berhasil menggalang partisipasi aktif dari masyarakat dengan memberikan ruang untuk diskusi terbuka tentang buku-buku yang mengangkat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antaragama. Observasi yang dilakukan selama kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang agama-agama yang berbeda serta mendorong sikap toleransi di antara peserta. Ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini efektif dalam menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk berdialog dan memahami perbedaan agama.

b. Kegiatan pameran buku dan diskusi publik

Kegiatan pameran buku tentang agama-agama di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman agama, tetapi juga memperkuat identitas lokal masyarakat Desa Glinggang. Diskusi publik yang terjadi selama pameran ini membawa manfaat yang signifikan dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai inklusi sosial dan pentingnya literasi moderasi beragama. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat berperan penting dalam mendukung kegiatan ini, memastikan bahwa program ini bukan hanya menjadi wadah untuk mendiskusikan perbedaan, tetapi juga untuk membangun harmoni di antara komunitas yang beragam.

c. Lokakarya literasi

Lokakarya literasi diadakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keterampilan literasi masyarakat, sambil juga memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama. Lokakarya ini mencakup kegiatan diskusi kelompok, presentasi, dan kegiatan praktis yang dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang agama-agama yang berbeda dan bagaimana menghormati perbedaan. Melalui lokakarya ini, peserta tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca dan menulis mereka, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kerukunan antaragama dalam masyarakat yang beragam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program inklusi sosial di perpustakaan memiliki potensi besar untuk menjadi model bagi program-program serupa di daerah lain. Rekomendasi untuk memperluas dan meningkatkan program-program ini termasuk peningkatan pendanaan, pengembangan lebih lanjut terhadap kegiatan literasi moderasi beragama, dan mengukuhkan peran perpustakaan sebagai pusat inklusi sosial yang efektif.

Dampak Program Inklusi Sosial terhadap Masyarakat

Implementasi program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Program "Baca Sama-sama", lokakarya literasi, dan pameran buku telah berhasil menciptakan ruang yang

inklusif dan aman bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Dampak dari program-program ini dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

a. Peningkatan pemahaman antaragama

Program-program inklusi sosial, seperti "Baca Sama-sama", telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang agama-agama yang berbeda. Diskusi dan dialog yang terjadi selama kegiatan ini membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang mungkin ada di antara anggota masyarakat. Peserta program menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan, yang pada gilirannya akan dapat memperkuat kerukunan sosial.

b. Penguatan jaringan sosial dan komunitas

Program inklusi sosial di perpustakaan juga telah memperkuat jaringan sosial dan komunitas di Desa Glinggang. Kegiatan-kegiatan literasi dan pameran buku memungkinkan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan membangun hubungan baru, baik dengan sesama warga maupun dengan tokoh agama dan pemimpin komunitas. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat

Program-program inklusi sosial telah mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya mungkin kurang terlibat dalam kegiatan literasi dan sosial. Partisipasi yang meningkat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dihargai dan diakui keberadaannya, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas.

d. Perubahan sikap terhadap keberagaman

Kegiatan lokakarya literasi dan pameran buku yang mengangkat tema keberagaman agama dan budaya telah membawa perubahan sikap positif terhadap perbedaan di antara anggota masyarakat. Sikap yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman membantu mengurangi konflik dan ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan agama dan budaya. Ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang harmonis dan damai di Desa Glinggang.

Dampak program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang menunjukkan bahwa perpustakaan dapat berperan lebih dari sekadar pusat informasi. Program-program yang diimplementasikan, telah menciptakan lingkungan yang mempromosikan kerukunan sosial dan membantu membangun kembali kepercayaan antar komunitas yang awalnya terpisah oleh perbedaan agama dan budaya. Dengan program yang tepat, perpustakaan dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif dalam mempromosikan literasi, inklusi, dan kerukunan

antaragama di masyarakat.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang telah menunjukkan banyak keberhasilan, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk tantangan dalam mengatasi prasangka dan stereotip, ketersediaan tenaga ahli dan relawan, kesadaran penuh masyarakat, dan kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan dan minat masyarakat. Berikut adalah beberapa poin mengenai tantangan dan hambatan tersebut:

a. Tantangan dalam mengatasi prasangka dan stereotip

Prasangka dan stereotip yang berkaitan dengan perbedaan agama dan budaya dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan inklusif di perpustakaan. Prasangka yang ada dapat menghambat interaksi antar anggota masyarakat dan mengurangi efektivitas program-program inklusi sosial. Penting untuk menyadari dan mengatasi prasangka ini melalui pendekatan yang bijaksana dan sensitif.

b. Ketersediaan tenaga ahli dan relawan

Implementasi program inklusi sosial membutuhkan tenaga ahli dan relawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Namun, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sering menjadi tantangan. Keterbatasan tenaga ahli dan relawan dapat menghambat pelaksanaan program-program dengan efektif. Perpustakaan kadangkala kesulitan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pemateri yang memiliki keahlian khusus, seperti lokakarya literasi atau diskusi antaragama.

c. Kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi moderasi beragama dan inklusi sosial masih perlu ditingkatkan. Beberapa anggota masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dari program-program ini. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dapat menghambat partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Hal ini juga dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpedulian terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh perpustakaan dalam mempromosikan inklusi sosial.

d. Kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan dan minat masyarakat

Mempertahankan keterlibatan dan minat masyarakat dalam program-program inklusi sosial dapat menjadi tantangan yang signifikan. Tanpa dukungan dan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat, program-program inklusi sosial dapat kehilangan momentum dan dampaknya dapat berkurang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting

untuk terus berinovasi dan mengadaptasi program-program tersebut agar tetap relevan dan menarik bagi masyarakat.

Dalam rangka mengatasi tantangan dan hambatan ini, perlu adanya strategi yang terencana dengan baik, termasuk peningkatan pendanaan, penggalangan partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran, serta kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis terhadap program-program yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa program inklusi sosial telah berhasil menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dialog antaragama dan antarbudaya. Program-program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti "Baca Sama-sama", lokakarya literasi, dan pameran buku yang menampilkan keberagaman agama dan budaya. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti adanya prasangka dan stereotip, ketersediaan tenaga ahli dan relawan, serta kesulitan dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat, program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan pemahaman antaragama dan penguatan jaringan sosial di komunitas. Untuk meningkatkan efektivitas program inklusi sosial di masa depan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pendanaan yang tersedia untuk perpustakaan. Pendanaan yang memadai diperlukan untuk memperluas program-program yang telah terbukti berhasil dan untuk mengembangkan inisiatif baru yang lebih inovatif. Selain itu, perlu terus dilakukan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya literasi moderasi beragama dan inklusi sosial. Penguatan kolaborasi antara perpustakaan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat juga sangat penting untuk memperluas jangkauan program dan memperkuat dukungan dari berbagai pihak. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan program inklusi sosial di Perpustakaan Wigati Desa Glinggang dapat terus menjadi model yang berkelanjutan dalam mendukung literasi moderasi beragama dan mempromosikan inklusi sosial di masyarakat.

5. Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, M., & Smith, R. K. (2016). Interreligious and Intercultural Education for Dialogue, Peace and Social Cohesion. *International Review of Education*, 62(4), 393–405. <https://doi.org/10.1007/s11159-016-9583-4>
- Depdiknas RI. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas RI.
- Imparsial. (2019). *Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang Tahun 2019*. [Https://Imparsial.Org](https://Imparsial.Org).
- Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Leuwol, F. S., Prayitno, M. A., Taryana, T., Suprihartini, Y., & Haddar, G. Al. (2023). Inclusive Education Perspectives: Montessori and Vygotsky's Approaches to Creating a Supportive Learning Environment For All Children. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 247–256.
- Prayitno, M. A., & Wathoni, K. (2022). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Proses Pendidikan di Lingkungan Sekolah Dasar. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 7(2), 124–130. <https://doi.org/10.24903/pm.v7i2.1125>
- Prodyanasari, A., Prayitno, M. A., Leuwol, F. S., Aminah, S., & Maskur, M. (2023). Comparison of Educational Theories: Perspectives of Carol Dweck and Howard Gardner in Developing Individual Potential. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(6), 725–732.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57–68. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Syukri, M., & Wahyuni, S. (2024). Perpustakaan Sebagai Jantung Pendidikan. *Tarbiatuna*, 4(1), 319–334.
- Woods, M. (2018). Precarious Rural Cosmopolitanism: Negotiating Globalization, Migration and Diversity in Irish Small Towns. *Journal of Rural Studies*, 64, 164–176. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.014>
- World Health Organization. (2019). *Civil Society Organizations to Promote Human Rights in Mental Health and Related Areas: WHO Quality Rights Guidance Module*. World Health Organization (WHO).